

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENCABULAN ANAK DI BAWAH UMUR
(STUDI KASUS NO. 518/PID.SUS/2021/PN.BKS)**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar

Sarjana Hukum

PROGRAM STUDI HUKUM



Disusun Oleh:

**Clareta Fiona Marcelia
181200016**

**PERMINATAN (HUKUM PIDANA)
UNIVERSITAS SATYA NEGARA INDONESIA FAKULTAS
ILMU SOSIAL DAN POLITIK**

2022

ABSTRAK

Anak sangat penting bagi negara ditandai dengan adanya Hari Anak Nasional setiap tahun dan adanya perlindungan serta hak-hak anak yang tercantum dalam Undang-Undang. Namun anak masih saja menjadi korban kekerasan seksual khususnya pencabulan dan selalu marak setiap tahunnya, ini dikarenakan persepsi di masyarakat bahwa anak adalah seseorang yang lemah dan tidak berdaya serta belum adanya pendidikan seksual (*sex education*) di Indonesia yang masih menjadi hal tabu bagi sebagian masyarakat Indonesia. Namun kenyataannya justru sangat penting supaya anak tahu bagian privat mana yang seharusnya tidak boleh dipegang oleh orang lain. Dalam pembahasan ini peneliti menggunakan teori keadilan dan kepastian hukum dan metode penelitian yang digunakan ialah penelitian normatif yuridis dimana peneliti mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Anak yang belum cakap akan hukum justru dicabuli bahkan oleh orang terdekat dalam kurun waktu yang lama dimana pelaku juga melakukan ancaman kekerasan kepada anak yang dari perbuatan tersebut anak korban hamil dan melahirkan, melihat hal tersebut aparat penegak hukum dituntut lebih aktif jika perkara menyangkut tentang anak. Yang dimana hakim memiliki kekuasaan kehakiman yang mengatakan hakim harus memiliki kemampuan untuk mengeksplorasi nilai-nilai keadilan yang ada di masyarakat yang dalam pertimbangannya tersebut bisa dijadikan acuan berupa yurisprudensi bagi hakim lain. Dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu tindak pidana hakim mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan yang dari hal tersebut bisa menjadi pertimbangan hakim memutuskan penjara maksimal 20 tahun penjara. Dengan dasar Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 81 bisa dikenakan ancaman 15 tahun penjara namun dalam ayat (3) jika dilakukan oleh orang tua atau wali hukuman penjaranya menjadi 20 tahun penjara. Penuntut umum menuntut 12 tahun penjara sedangkan hakim memutuskan 13 tahun penjara, hanya melebihi satu tahun, melihat hal tersebut maka jelas menjadi ketidakpastian hukum dan sangat tidak adil bagi anak korban. Mengingat Secara biologis, sebelum pubertas organ-organ vital anak tidak disiapkan untuk melakukan hubungan intim, apalagi untuk organ yang memang tidak ditujukan untuk hubungan intim. Jika dipaksakan, maka tindakan tersebut akan merusak jaringan ditambah ketika anak diancam, maka saat itu juga secara alami tubuh anak juga melakukan pertahanan atau penolakan. Ketika secara biologis tubuh anak menolak, maka paksaan yang dilakukan pun akan semakin menimbulkan cedera dan kesakitan pada anak. Inilah yang menimbulkan tarumatis bagi anak hingga dewasa.

Kata kunci: Pencabulan Anak di Bawah Umur, Kewenangan Hakim, Dasar Pertimbangan Hakim.

ABSTRACT

Children are very important for the country which is marked by the existence of National Children's Day every year and the protection and rights of children stated in the law. However, children are still victims of sexual violence, especially sexual abuse and are always rampant every year, this is due to the perception in society that children are weak and helpless and the absence of sexual education in Indonesia which is still a something not nice to say for some Indonesian people. But actually it is very important that children know which private parts should not be held by others. In this discussion the researcher uses the theory of justice and law and the research method used is a juridical normative researcher which refers to Law Number 17 of 2016 concerning Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law Number 1 of 2016 concerning the Second Amendment to Law Number 23 of 2016 2002 concerning Child Protection. Children who are not yet proficient with the law are actually molested even by the closest people for a long time where the perpetrators also threaten violence to children from these actions, the victim's child is pregnant and gives birth, seeing that law enforcement officers are more active when cases involve children. Where the judge has judicial power which says judges must have the ability to explore the values of justice that exist in society which in their consideration can be used as a reference in the form of jurisprudence for other judges. In making a decision on a criminal act, the judge considers aggravating and mitigating things from this, the judge can consider a maximum prison sentence of 20 years in prison. Based on Article 81 of the Child Protection Law, it can be subject to 15 years in prison but in paragraph (3) if it is done by a parent or guardian the prison sentence is 20 years in prison. The public prosecutor demanded 12 years in prison while the judge decided to go to 13 years in prison, exceeding one year. Seeing this, it is clear that it is legal uncertainty and unfair to the victim's child. Biologically, before puberty a child's vital organs are not prepared for intercourse, especially for organs that are not intended for intercourse. If forced, then the action will damage the network when the child is threatened, then at that time the child's body naturally also protects or refuses. When the child's body biologically refuses, the coercion carried out will cause injury and action to the child. This is what causes tarumatism for children to adults.

Key Word: Child Molestation, judge's authority, judge's consideration.